



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 15/KEP/DPRD/V/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2021 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus yang berupa catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15/KEP/DPRD/V/2021
TANGGAL : 7 MEI 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Secara umum :

- a. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik selain diukur dari tingkat akuntabilitas dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian juga diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sehingga survei kepuasan masyarakat perlu dijadikan sebagai tolak ukur perbaikan kinerja.
- b. Indikator dalam LKPJ agar menampilkan trend selama 5-10 tahun, sehingga terlihat peningkatan atau penurunan capaiannya. Selain data, agar ditampilkan pula rincian penjelasannya.

2. Berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	Pendidikan	a. Urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang bersifat wajib. Selain itu di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 mendorong sektor pendidikan sebagai salah satu potensi unggulan. Tetapi capaian kinerja pemerintah Kota Yogyakarta pada sektor pendidikan tidak mendapat apresiasi dari pemerintah Pusat. Hal ini didasarkan pada data Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni mendapatkan skor E dan Peta Mutu Pendidikan mendapatkan skor C.	Perlu segera mencari solusi untuk meningkatkan skor, misalnya dengan membuat SPM untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta selama pandemi.

		<p>b. Jaminan Pendidikan Daerah untuk siswa yang lulus agar tidak hanya berlaku untuk tahun berjalan tapi dapat mengakomodir 5 - 10 tahun sesudah lulus.</p>	<p>Agar dibuat kebijakan yang dapat mengakomodir yaitu dengan melakukan Perubahan atau penambahan Perwal Jaminan Pendidikan Daerah</p>
		<p>c. Kurangnya pelayanan pendidikan wilayah selatan, terutama tingkat sekolah menengah pertama,</p>	<p>Penyebaran sekolah secara merata (tidak hanya di wilayah utara), segera melakukan pemindahan SMP 14 ke wilayah selatan. Pemerataan sekolah negeri ke wilayah selatan.</p>
		<p>d. Program pendidikan nonformal/kursus/pelatihan agar mendapat perhatian yang serius dalam usaha untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi.</p>	<p>Support anggaran dari APBD untuk pendidikan nonformal.</p>
		<p>e. Tidak sebandingnya guru yang pensiun tahun 2020 sebanyak 153 orang, sedangkan penambahan CPNS guru baru sejumlah 48 orang. Hal ini tidak sebanding dan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selain itu, ada prosentase guru sesuai kualifikasi 96,21% dari 99,67%.</p>	<p>Perlu ada perencanaan yang matang dalam proses rekrutmen guru. Adanya standarisasi kualitas bagi guru-guru honorer jika pengangkatan CPNS masih terkendala aturan dari pusat.</p>
		<p>f. Masih terjadi kesenjangan sarana dan prasarana sekolah negeri dan swasta.</p>	<p>Perlu ada supporting APBD untuk sekolah negeri agar tidak semakin tertinggal dan disusun Standar Pelayanan Minimum untuk menjaga kualitas/standar sekolah</p>
		<p>g. Belum semua sekolah di Kota Yogyakarta menjadi sekolah inklusi</p>	<p>Mengupayakan pemenuhan sarpras dan SDM agar semua sekolah menjadi sekolah inklusi</p>

2.	Kesehatan	<p>a. Tahun 2020 kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dengan mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat kurang lebih 23,9 Miliar. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10,46 Miliar. Adapun capaian kinerja sektor kegiatan yang tidak mengalami penurunan signifikan yaitu balita mendapatkan imunisasi lengkap yang memperoleh nilai E dari pemerintah Pusat dan Penanganan Balita Stunting memperoleh nilai E. Penanganan balita stunting mengalami penurunan capaian kinerja yang sehingga apresiasi dana insentif menurun hingga 2 Miliar.</p>	<p>Mohon tidak maksimalnya capaian kinerja bidang kesehatan sub sektor tersebut dapat menjadi perhatian dan catatan perbaikan kedepan.</p>
		<p>b. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru 78,88% dari target 100%.</p>	<p>Program harus berbasis data. Belum optimalnya penggunaan olahan data (integrasi database beneficiaries) untuk menjamin ketepatan sasaran</p>
		<p>c. Target Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% namun yang terealisasi 90,21%.</p>	<p>Perlu ada penjelasan mengenai hal ini terkait efektifitas penyelenggaraan Kesehatan (optimalisasi Puskesmas dan kapasitas SDM serta kesadaran masyarakat)</p>
		<p>d. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 100% yang terealisasi 85,39%.</p>	<p>Perlu didorong peningkatan pelayanan Kesehatan berbasis komunitas (Posyandu/Posbindu)</p>
		<p>e. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart dari target 100%</p>	<p>● Perlu ada penanganan yang lebih terpadu terkait ODGJ dengan mendorong dan memfasilitasi model</p>

		terrealisasi 86,55%.	<p>pemberdayaan ODGJ berbasis komunitas yaitu proses pendampingan dilakukan oleh komunitas dan keluarga untuk berpartisipasi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY berkaitan dengan permasalahan ODGJ terutama agar ODGJ dapat ditampung di Panti Karya.
3.	Adminduk	<p>a. Banyak warga masyarakat yang belum tahu dan paham pengurusan administrasi <i>online</i>.</p> <p>b. Penumpukan antrian pelayanan adminduk di Balaikota.</p> <p>c. Pengurus RT/RW banyak yang tidak mengetahui ada penduduk baru.</p>	<p>Perlu sosialisasi sampai tingkat bawah untuk pengurusan Adminduk <i>online</i>. Kelurahan dan Kecamatan harus bisa menjadi pendamping dan membantu percetakan pengurusan adminduk bagi yang tidak faham sistem <i>online</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan KTP tanpa merubah data dikembalikan ke Kecamatan, agar tidak terjadi penumpukan dan tidak memberatkan manula serta kaum difabel. • Kuota pengurusan Adminduk agar ditambah, sehingga lebih bisa mengakomodir antrian. <p>Dinas Dukcapil agar dapat memberikan data kedatangan penduduk baru ke RT/RW, perlu konsolidasi antar OPD (Dinas Kominfo dengan Dinas Dukcapil).</p>

			Harus ada SOP mengenai pelayanan adminduk baik di tingkat kecamatan maupun Dinas Dukcapil
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Berdasarkan laporan pemerintah pusat menyebutkan pada tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta belum mampu secara maksimal dalam memenuhi akses sanitasi yang layak bagi warganya.	Membuat langkah strategis untuk pemenuhan akses sanitasi yang layak bagi warga.
		b. Belum optimalnya respon pemerintah atas informasi dari masyarakat terkait keluhan kerusakan sarana prasarana umum (jalan, jembatan, SAH, SAL, Talud, PJU).	Pemerintah Kota Yogyakarta agar membuat unit team reaksi cepat (TRC) untuk merespon keluhan masyarakat terhadap kerusakan infrastruktur dan berkomunikasi dengan instansi lain yang terkait untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut.
		c. Banjir (genangan air) yang sering timbul karena kapasitas saluran drainase mengecil akibat bisnis laundry/cuci mobil.	Perlunya penataan drainase, untuk mengurangi debit drainase yang masuk ke sungai, bisa kombinasi dengan sistem resapan.
		d. Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan ramah bagi kaum difabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan adanya audit dan monev terhadap bangunan apakah bangunan tersebut ramah terhadap kaum difabel. • Monev tidak hanya menasar inrastruktur fisik saja namun juga ada kegiatan pelatihan bagi kaum difabel agar dapat merespon bencana dengan baik
5.	Kebudayaan	a. Dalam pembangunan pengembangan dan pelestarian budaya, baru ada 21 rintisan Kelurahan Budaya dari total 45 kelurahan yang ada.	OPD terkait harus secara massif menguatkan lembaga-lembaga budaya di seluruh kelurahan se-Kota Yogyakarta lewat sosialisasi dan pembinaan.

		b. Cagar Budaya di Kota Yogyakarta masih banyak yang belum terawat dengan baik	Pemerintah Kota Yogyakarta agar memfasilitasi pelestarian cagar budaya dengan mengajukan danais bagi pemeliharaan dan perawatan cagar budaya.
6.	Sosial	a. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2019 hingga 2020 belum mengeluarkan upaya yang maksimal. Hal ini ditandai dengan anomali data kemiskinan dan apresiasi capaian kinerja penurunan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan tetapi capaian kinerja tersebut belum mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat dengan mendapatkan skor E. Tercatat bahwa angka kemiskinan dalam data statistik di Kota Yogyakarta juga meningkat dari 6.84 % di tahun 2019 naik menjadi 7,27 % di tahun 2020.	Perlu disusun strategi yang sinergis antar OPD untuk menekan angka kemiskinan
		b. Masih ada data kemiskinan ganda penerima bantuan dampak pandemi virus corona.	Membangun sistem data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi.
		c. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan KMS terutama untuk pendidikan, tetapi KMS sudah dicabut tanpa kejelasan.	Perlu penyesuaian barometer penilaian KMS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota (Perwal variabel kemiskinan)
		d. Adanya laporan LPMK dan Tokoh Masyarakat kepada DPRD terkait pemotongan Dana Jadup & Penyelenggaraan Program Gandeng-	Walikota Yogyakarta selaku penanggung jawab anggaran agar segera menindaklanjuti hasil karena program tersebut sangat bersentuhan

		Gendong	langsung dengan hajat hidup masyarakat di Kota Yogyakarta. Proses pencairan Jadup ke depannya agar lebih dipermudah
		e. Parameter keberhasilan pembangunan daerah salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai IPM pada tahun sebelumnya diapresiasi dengan mendapat transfer dana insentif sebesar 12,4 Miliar dan pada tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan skor E untuk pembangunan manusia serta tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.	IPM merupakan hal mendasar, oleh sebab itu kendala Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target IPM agar segera dapat dicari solusinya.
7.	Ketertiban	a. Penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dari ukuran statistik ada tren penurunan namun secara kualitatif juga harus ditingkatkan, seperti kasus Klitih yang menjadi viral.	Evaluasi kinerja OPD dan <i>stakeholder</i> terkait dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi.
		b. Penegakan Perda terkait Parkir dan PKL perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Agar Pemkot secara tegas dan cepat melaksanakan penegakan perda terhadap pelanggaran yang ada serta dilakukan dengan tidak tebang pilih. • Agar laporan terhadap penegakan perda oleh Pemkot disampaikan kepada DPRD secara berkala sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

8.	Pariwisata	<p>a. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, standar protokol kesehatan Kawasan Malioboro perlu lebih ditingkatkan.</p>	<p>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY berkaitan dengan kejelasan kewenangan pengelolaan Kawasan Malioboro.</p>
		<p>b. Kota Yogyakarta dengan kapasitas SDM, anggaran dan reputasi yang memadai punya peluang untuk dikembangkan secara akseleratif, terutama untuk mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata.</p>	<p>Perlunya pengembangan konsep progresif pembangunan untuk mendukung target wisata, misalnya dengan konsep <i>livable city</i> agar terwujud sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman dan menjadi tujuan wisata yang lengkap dari berbagai aspek, baik fasilitas maupun kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke Kota Yogyakarta.</p>
		<p>c. Kampung Wisata baru hanya plangnya saja, tapi belum ada <i>action</i> yang riil.</p>	<p>Agar Dinas Pariwisata tidak hanya sekedar membuat label kampung wisata tapi membuat program yang benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan beserta support anggaran.</p>
		<p>d. Salah satu masalah dan amanat dalam RPJMD adalah bagaimana sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Yogyakarta, di mana hal ini belum banyak dielaborasi di LKPJ.</p>	<p>Perlu dorongan untuk gerakan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism</i>) melalui pemanfaatan potensi, penguatan kapasitas, kelembagaan (koperasi/pokdarwis), dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku/komunitas wisata masyarakat skala mikro/kecil.</p>
9.	Keuangan	<p>a. Hasil temuan & rekomendasi BPK-RI terkait penyelenggaraan Anggaran BTT APBD Tahun 2020.</p>	<p>Walikota selaku penanggungjawab anggaran, agar segera menindaklanjuti hasil temuan & rekomendasi BPK-RI terkait penyelenggaraan Anggaran BTT APBD Tahun 2020. Jangan sampai hal tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Yogyakarta karena ada penyedia jasa yang berani menolak untuk memberikan keterangan &</p>

			prasyarat yang diberikan oleh Walikota terkait dengan temuan & hasil rekomendasi BPK-RI terhadap penyelenggaraan Dana BTT 2020.
		b. Hasil temuan dan rekomendasi BPK-RI atas APBD 2020	Organisasi Perangkat Daerah untuk tetap tertib administrasi dalam situasi apapun, segala bentuk penyerahan barang/ dokumen/ aset dan lain-lain harus dilengkapi dengan berita acara, agar ketika di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban lebih mudah untuk melakukan proses tracking.
		c. Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota, maka pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran transfer dana berupa dana insentif daerah. Pada tahun 2021 dana insentif daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, dana insentif tersebut sebesar 92,13 Miliar, sedangkan pada tahun 2021 dana insentif yang didapatkan atas kinerja pemerintah kota mengalami penurunan menjadi 72,69 milyar.	Perlu dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh atas penurunan dana insentif daerah tersebut.
		d. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan, dalam hal upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan skor D atau belum optimal.	Pencapaian kinerja yang baik didasarkan pada proses akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Proses akuntabilitas dan transparansi tersebut mampu meminimalisir terjadinya potensi korupsi. Upaya pencegahan korupsi mendapatkan porsi penilaian lebih oleh pemerintah pusat. Mohon agar kedepannya dapat

			lebih menjadi perhatian.
		e. Banyak alokasi anggaran tertentu yang harus dipangkas ketika pandemi Covid-19 melanda	Untuk menghadapi kondisi pandemi, ke depan perlu ada dana cadangan.
		f. Masih banyak dijumpai SPT PBB tertera atas nama bukan pemilik tanah (sering dijumpai atas nama pengontrak) sehingga membingungkan warga.	Perlunya perbaikan sistem dalam sinkronisasi dan <i>updating</i> data pada SPT PBB.
		g. Stagnasi PAD di Kota Yogyakarta, padahal Kemampuan Keuangan Daerah termasuk tinggi dikarenakan penegakan perda yang belum maksimal.	Penegakan perda agar dapat lebih ditingkatkan.
10.	Penelitian dan Pengembangan	Salah satu hal yang akan menunjang Kota Yogyakarta dalam mencapai kota yang berdaya saing adalah melalui inovasi daerah. Tetapi kami menangkap tidak adanya upaya yang maksimal dalam melakukan inovasi daerah di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Inovasi daerah Kota Yogyakarta di Kemendagri yang tidak memperoleh skor.	Perlu adanya upaya untuk lebih mendorong adanya inovasi pemerintah terutama dalam hal pelayanan.
11.	Koperasi UKM	a. Belum nampak adanya model kolaborasi multipihak yang sistemik berkelanjutan sesuai amanat RPJMD dan kekhasan kota Yogyakarta dalam program pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat (UKM) dan koperasi di sektor basis kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, khususnya melalui gerakan Gandeng Gendong untuk mengatasi masalah kemiskinan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibuat kajian mengenai keberlangsungan program Gandeng Gendong. • Perlu adanya program nyata kolaborasi multipihak yang sistemik berkelanjutan khususnya dengan Perguruan Tinggi sebagai kekhasan/keunggulan Kota Yogyakarta dalam

	ketimpangan.	implementasi gerakan Gandeng Gendong melalui berbagai pendidikan informal yang sistemik, berkelanjutan, dan digitalized untuk memberdayakan kapasitas SDM, manajemen, dan penguasaan teknologi (digitalisasi) UKM dan koperasi di Kota Yogyakarta.
	b. Pembayaran melalui Gandeng-Gendong sering terlambat.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pencairannya dipermudah agar tidak memberatkan pelaku UMKM. • Kualitas produk juga perlu dibuat standar minimal.
	c. Bantuan usaha kecil masyarakat harus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat.	Keberadaan aplikasi online Jogja Smart Service (JSS) diharapkan juga melibatkan proses melalui perizinan RT/ RW setempat terutama dalam hal pengembangan bantuan UMKM.
	d. Kebijakan yg masih kurang dirasakan oleh masyarakat dalam hal pendirian koperasi.	Mendorong pendirian koperasi dengan mengeluarkan kebijakan pemantik dari Pemkot sebagai upaya supporting dalam hal legalitas.
	e. Indikator Capaian Kinerja program yang dipilih terkait dengan koperasi dan UKM sebagai pelaksanaan salah satu misi Kota Yogyakarta dalam memperkuat ekonomi kerakyatan masih belum menggambarkan implementasi ekonomi	Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merumuskan indikator pengukuran ekonomi kerakyatan yang lebih sesuai dan komprehensif. Semisal indikator kinerja koperasi dan UKM bukan hanya jumlah asset dan omset melainkan juga pangsa (share) nya terhadap perekonomian

		kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang hendak dijadikan dasar sekaligus hendak diwujudkan di Kota Yogyakarta, sebagai solusi atas masalah kemiskinan dan ketimpangan.	(PDRB) Kota Yogyakarta secara keseluruhan. Sebagai referensi dapat dilihat di Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) (Santosa, 2009).
		Salah satu permasalahan pembangunan dalam RPJMD adalah pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, yang belum banyak dielaborasi dalam program dan laporan di dalam LKPJ padahal Kota Yogyakarta memiliki keunggulan di sektor ekonomi kreatif tersebut.	Perlu adanya roadmap pengembangan ekonomi kreatif Kota Yogyakarta yang berbasis pada pemecahan masalah ekonomi rakyat di sektor basis, dipelopori kaum muda, mengadopsi teknologi digital, kolaborasi multipihak, dan perlu dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) ekonomi kreatif Kota Yogyakarta untuk mengeksekusi roadmap tersebut.
12.	Lingkungan Hidup	Program pengelolaan sampah pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah baik dan sesuai jalur tetapi yang menjadi problem adalah program yang tidak berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Program 3R (<i>Reduce, Reuse, recycle</i>) agar melibatkan warga secara berkesinambungan. • Membuat <i>roadmap</i> yang jelas mengenai arah pengelolaan sampah. Hal ini terkait dengan identifikasi sampah yang timbul, strategi pengumpulandi level rumah tangga, komunal, pengumpulan dan juga transportasi. Jika roadmap jelas, semua akan sinkron dari level rumah tangga sampai ke pusat. Begitu juga bisa ditentukan jenis teknologi dan <i>stakeholder</i> yang terlibat. • Perbaiki kondisi tempat pembuangan sampah sementara, perbaikan kualitas truk sampah (tertutup, bersih). Perlu adanya pemisahan sampah, penjadwalan pengambilan sampah/ truk tidak dicampur.

		Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.	Agar disusun program pemenuhan target RTH.
13.	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Kampung dirasa masih parsial	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kampung perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar kegiatan terus dapat dilaksanakan oleh masyarakat. • Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengkaji ulang Program Gandeng Gendong karena ada permasalahan teknis yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. • Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengoptimalkan dan memperkuat sinkronisasi Konsep Temoto, Temonjo, Kroso dengan menambah dan mengintegrasikan mimpi masyarakat dan 5 K (Korporat, Komunitas, Kampung, Komunitas, Kota. Perlu ada Komisi Perencana di tiap kelurahan.
14.	Kepemudaan dan Olahraga	Masih kurangnya wadah untuk pengembangan kegiatan pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perda kepemudaan • Revitalisasi kelembagaan kepemudaan, dan pengembangan kegiatan seperti pengembangan sentra-sentra kreatif pemuda dan pengembangan pusat-pusat olahraga di beberapa titik kota yang dapat diakses semua masyarakat.

15.	Perhubungan	a. Penataan transportasi yang masih perlu dibenahi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jalur sepeda • Menggiatkan kembali anjuran untuk bersepeda dengan asumsi siswa sudah zonasi sekolah dan sekarang terjadi defisiensi vitamin D.
		b. Prediksi ketidaklancaran lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan parkir di titik-titik dekat <i>traffic light</i>. • <i>Smart traffic light</i>. • Penambahan trotoar berkualitas.
16.	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Permasalahan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penanganan yang serius dan terintegrasi antar OPD yang berwenang. • Kedepan perlu memikirkan hunian vertikal
17.	Penanaman Modal	Perlunya penataan investasi di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan regulasi sebagai tindak lanjut aturan pusat. • Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan investasi.
18.	Perdagangan	Salah satu permasalahan pembangunan dalam RPJMD yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan adalah persaingan tidak seimbang di sektor perdagangan antara pelaku perdagangan kecil dan besar, yang terkait dengan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan penguasaan teknologi.	Perlu program yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM pedagang pasar tradisional, kelembagaan, manajemen, dan penguasaan teknologi (termasuk digitalisasi pasar tradisional) melalui kolaborasi multipihak khususnya dengan Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta. Dalam pada itu perlu ada roadmap & pola kolaborasi bagi pengembangan pasar tradisional dan toko rakyat kota Yogyakarta berbasis keistimewaan (budaya) ke depan.

3. Perlu sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD dan lintas sektor berkaitan dengan:
 - a. maraknya peredaran pil koplo;
 - b. penanganan warga terkonfirmasi positif Covid-19;
4. Semua catatan permasalahan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Catatan permasalahan dan rekomendasi pada tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera ditindaklanjuti.
5. Catatan permasalahan dan rekomendasi ini menjadi bahan acuan perencanaan, pembahasan dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO